

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan secara geografis Indonesia berada di garis khatulistiwa dan iklim tropisnya sangat cocok untuk pengembangan pertanian. Petani dapat menyesuaikan benih mereka dengan musim. Sehingga peran pertanian juga dapat menghasilkan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang dan rumah. Tidak ada pengganti pertanian sebagai bahan pangan, sehingga pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam keadaan darurat. Sebagian besar tanah Indonesia digunakan untuk pertanian, termasuk budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Peran petani tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena petani menyediakan semua kebutuhan pangan setiap anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Tentunya, tanpa petani, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya bahkan harus mengimpor pangan dari luar negeri. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah yang diduga dapat meningkatkan perekonomian negara (Jusuf, 2022).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) yang diterbitkan tanggal 18 Oktober 2006 merupakan salah satu agenda Revitalisasi Pembangunan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Undang-undang (UU) ini mengamanatkan bahwa bentuk kelembagaan pelaku utama pertanian adalah kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi. UU ini merupakan satu titik awal khususnya dalam pemberdayaan para petani melalui peningkatan sumberdaya manusia (Undang-Undang Nomor 16 tentang SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN, 2006).

PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian merupakan amanat dari UU Ciptaker, namun dalam konsideran menimbang tidak menjelaskan secara rigid amanat pasal dari UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian. Undang-Undang No. 22 Tahun 2019

tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Pertanian tidak akan maju jika terus menggunakan cara lama atau teknologi lama jadi pertanian membutuhkan inovasi dan teknologi baru untuk dapat meningkatkan perkembangan zaman dengan hal ini membuat teknologi pertanian akan semakin berkembang. Industri pertanian terlibat dalam pengolahan hasil pertanian atau lebih tepatnya dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk pertanian melalui penggunaan teknologi yang tepat guna. Agribisnis merupakan usaha yang berada dibidang pertanian yang mengarahkan pemikiran dan pengetahuan kepada para petani untuk mewujudkan pertanian yang unggul. Model kemitraan sektor pertanian sangat penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menggerakkan sumber daya pedesaan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing. Dengan bermitra dengan perusahaan, petani mendapatkan keuntungan seperti kemampuan untuk mengatasi tantangan keuangan, meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan akses pasar untuk produk mereka. Pada saat yang sama, perusahaan memiliki pasokan bahan baku berkualitas tinggi yang konstan. Kemitraan adalah kemitraan antara berbagai pelaku di sektor pertanian, mulai dari tingkat produksi hingga tingkat pasar (Aji, 2012).

Pertanian adalah salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia masih bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka, dan sektor ini memiliki peran krusial dalam memastikan ketahanan pangan nasional. Namun, petani sering menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi hasil dan produktivitas pertanian mereka. Salah satu tantangan utama yang dihadapi petani adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik bertani yang modern dan efisien. Banyak petani masih menggunakan metode tradisional yang mungkin tidak lagi efektif atau produktif. Untuk mengatasi masalah ini, program Penyuluhan pertanian dapat menjadi solusi yang sangat membantu (Muhammad, 2010).

Di Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan

dan dukungan kepada petani. BPP bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi, pelatihan, dan bantuan teknis yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani. Program Penyuluhan dari BPP bertujuan untuk memperkuat kapasitas petani dengan cara yang sistematis dan terarah. Penyuluhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik bertani yang lebih baik hingga cara mengelola sumber daya secara efisien. Dengan mendapatkan informasi yang tepat, petani dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai praktik pertanian mereka (Pakpahan *et al.*, 2021)

Studi mengenai Penyuluhan di BPP sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana program ini berdampak pada petani lokal. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang kekuatan dan kelemahan program Penyuluhan, serta area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian. Melalui Penyuluhan yang efektif, petani diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan petani, tetapi juga dapat membantu dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat setempat (Halid *et al.*, 2024).

Selain itu, peningkatan kapasitas petani juga dapat membawa manfaat yang lebih luas, seperti peningkatan ketahanan pangan di tingkat lokal dan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi daerah. Dengan hasil pertanian yang lebih baik, daerah tersebut bisa mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Penting juga untuk mencatat bahwa pelatihan dan Penyuluhan harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik petani di masing-masing daerah. Dalam hal ini, BPP perlu memahami tantangan unik yang dihadapi petani di Kecamatan Sukorejo agar program Penyuluhan dapat disesuaikan dengan situasi lokal (Manitik *et al.*, 2021)

Dengan melakukan studi mendalam tentang program Penyuluhan di BPP Kecamatan Sukorejo, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Temuan dari studi ini dapat digunakan untuk merancang program Penyuluhan yang lebih efektif di masa depan. Secara keseluruhan, penguatan kapasitas petani

melalui Penyuluhan adalah langkah penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Kecamatan Sukorejo. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan program Penyuluhan pertanian di daerah tersebut (Hasugian et al., 2014)

Peranan Penyuluhan pertanian sebagai fasilitator, motivator dan pendukung gerak usaha petani merupakan titik sentral dalam memberikan Penyuluhan kepada petani, berkaitan dengan pengelolaan usahatani yang berkesinambungan dan ramah lingkungan. Kesalahan dalam memberikan Penyuluhan kepada petani nantinya akan menimbulkan dampak negatif yang dapat membahayakan lingkungan. Pada prinsipnya proses penyelenggaraan Penyuluhan pertanian dapat berjalan dengan baik dan benar apabila didukung dengan tenaga Penyuluhan yang profesional, kelembagaan Penyuluhan yang handal, materi Penyuluhan yang berkelanjutan, sistem penyelenggaraan Penyuluhan yang benar serta metode (DWP & Waridin, 2015).

Penyuluhan yang tepat dan manajemen Penyuluhan yang sinergi. Dengan demikian maka Penyuluhan pertanian sangat penting artinya dalam memberikan modal bagi petani dan keluarganya. Sehingga pada saat itulah akan terbentuk kapasitas kemampuan untuk dalam menolong dirinya sendiri dalam mencapai tujuan, memperbaiki kesejahteraan hidup petani dan keluarganya, tanpa harus merusak lingkungan sekitarnya (DWP & Waridin, 2015). Dalam upaya penguatan kapasitas petani melalui Penyuluhan yang dilakukan oleh BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, terdapat beberapa permasalahan signifikan yang perlu diatasi. Permasalahan utama yang muncul terkait dengan keterbatasan jumlah dan kualitas Penyuluhan pertanian yang tersedia, serta anggaran yang kurang memadai, yang secara bersamaan menghambat efektivitas pelaksanaan program Penyuluhan. Keterbatasan jumlah Penyuluhan menyebabkan cakupan Penyuluhan menjadi tidak optimal, sementara kualitas Penyuluhan yang terbatas dapat mempengaruhi kualitas informasi dan bimbingan yang diberikan kepada petani. Selain itu, anggaran yang

tidak mencukupi membatasi kemampuan BPP untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan Penyuluhan dan dukungan yang dibutuhkan petani, sehingga mengurangi dampak positif dari program yang dijalankan (Septiana, 2021).

Referensi sebagai acuan adalah langkah awal yang penting, setelah meninjau literature yang ada, terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu yang pertama, menurut Navis Febians (Arifin, n.d., 2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Penyuluhan Pertanian Terhadap Produksi Padi Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan”. Penelitian ini membahas pelaksanaan kegiatan Penyuluhan pertanian dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap produksi padi di Desa Lemahbang, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Untuk memahami dampak Penyuluhan pertanian, analisis regresi linier berganda digunakan untuk menilai sejauh mana program Penyuluhan mempengaruhi hasil produksi padi. Program Penyuluhan yang diterapkan mencakup berbagai aspek teknis, termasuk pengolahan lahan, pemilihan varietas unggul, pemupukan, pengairan, serta pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan gulma. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara implementasi program Penyuluhan dan peningkatan produksi padi, serta memberikan wawasan mengenai efektivitas masing-masing komponen program dalam meningkatkan hasil panen di daerah tersebut (Halid et al., 2024)

Penelitian terdahulu yang kedua, menurut Wulandari (Teguh Prasetyo et al., 2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Petani Melalui Penguatan Kapasitas Penyuluhan Di Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima”. Membahas Pelaksanaan Penyuluhan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan petani padi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Penyuluhan di BPP Kecamatan Sukorejo belum berjalan optimal, terutama disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, tidak semua Penyuluhan berhasil menyampaikan materi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik petani padi, yang mengakibatkan informasi dan

bimbingan yang diberikan tidak selalu relevan dan efektif dalam meningkatkan praktik pertanian mereka. Kedua, terdapat masalah keterbatasan personil Penyuluhan yang tidak sebanding dengan jumlah kelompok binaan yang harus mereka tangani. Kekurangan ini menyebabkan Penyuluhan menjadi kurang intensif dan kurang personal, sehingga sulit bagi Penyuluhan untuk memberikan perhatian dan dukungan yang memadai kepada setiap kelompok petani. Akibatnya, efektivitas Penyuluhan menurun dan capaian program tidak sesuai dengan yang diharapkan, menghambat upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

Penelitian terdahulu yang ketiga, menurut Abdul Rais (Safaruddin et al., 2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Pelatihan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian Dalam Pembuatan Media Penyuluhan Di Balai Penyuluhan (BPP) Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara”. Membahas Penyuluhan pertanian sebanyak 30 orang yang berasal dari 2 BPP yakni BPP Bone-Bone dan BPP Tana Lili, mampu menyusun media Penyuluhan berupa leaflet, brosur, panplet, stiker dan label, baik secara manual maupun secara elektronik dengan menggunakan sarana informasi teknologi (IT) berupa laptop yang diakses dengan internet. Penyuluhan ini nantinya akan digunakan oleh para Penyuluhan pertanian sebagai media Penyuluhan dan bahan ajar kepada kelompok tani agar para petani lebih terbangun kapabilitasnya dalam menerapkan teknologi usahatani sehingga bisa lebih efektif dalam berusaha tani dan nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.

Penelitian terdahulu yang keempat, menurut Sucihatningsih (DWP & Waridin, 2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Tani Melalui TRANSACTION COST”. Dalam membahas evaluasi kinerja petugas Penyuluhan pertanian dan estimasi biaya transaksi yang dibutuhkan untuk merancang skenario lembaga konseling, hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pertanian di daerah penelitian saat ini belum mencapai efisiensi optimal. Penilaian terhadap kinerja petugas

Penyuluhan mengungkapkan bahwa terdapat kelemahan dalam pelaksanaan Penyuluhan yang berdampak negatif pada hasil pertanian. Selain itu, analisis biaya transaksi diperlukan untuk merancang skenario lembaga konseling yang efektif, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani. Penelitian ini menyoroti bahwa ada peluang signifikan untuk mengoptimalkan produksi pertanian melalui pendekatan konseling yang lebih baik, yang dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang lebih terarah kepada petani, serta membantu mereka mengatasi tantangan yang ada dalam praktik pertanian mereka.

Penelitian terdahulu digunakan sebagai upaya para peneliti dalam mencari perbandingan dan sebagai sumber inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Kebaruan penelitian ini dengan penelitian dahulu ialah mengenai penguatan kapasitas petani melalui Penyuluhan studi pada BPP Sukorejo. Pada topik penelitian ini akan mengambil permasalahan yang akan diteliti dan dijelaskan mengenai keterbatasan jumlah dan kualitas Penyuluhan pertanian yang tersedia, serta anggaran yang kurang memadai, yang secara bersamaan menghambat efektivitas pelaksanaan program Penyuluhan.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana Penguatan Kapasitas Petani Melalui Penyuluhan Studi Pada (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo?”

#### C. Tujuan Masalah

Dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami penguatan kapasitas petani melalui Penyuluhan studi pada (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### 1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mahasiswa memperoleh informasi tentang penguatan kapasitas petani melalui Penyuluhan studi pada (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Sehingga dapat memperkaya kajian pada wawasan mengenai pertanian (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP. Dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu dalam sektor petani.

## **2. Secara Praktis**

### **a. Manfaat bagi peneliti**

Dengan penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Penguatan Kapasitas Petani Melalui Penyuluhan Studi Pada (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

### **b. Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo**

Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam memimpin untuk memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat petani melalui Penguatan Kapasitas Petani Melalui Penyuluhan Studi Pada (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo

## **E. Penegasan Istilah**

Istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini dijelaskan di bawah ini agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Selain itu, istilah-istilah tersebut merupakan pedoman dan tujuan yang dicapai oleh penelitian ini, sehingga para pembaca memahami apa yang ingin dicapai oleh penelitian ini. Judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Penguatan Kapasitas Petani Melalui Penyuluhan Studi Pada (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Salah satu istilah ini disorot sebagai berikut :

### **1. Penguatan**

Penguatan adalah proses atau tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kekuatan, kapasitas, atau kemampuan sesuatu, baik itu individu, organisasi, atau sistem. Dalam konteks manajemen dan

pengembangan sumber daya manusia, penguatan dapat merujuk pada berbagai strategi yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja, menambah keterampilan, dan membangun motivasi. Ini termasuk pelatihan, pemberian umpan balik yang konstruktif, serta penerapan sistem penghargaan dan insentif. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana individu atau kelompok dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi secara maksimal terhadap tujuan organisasi atau komunitas. Dalam konteks kebijakan publik, penguatan juga bisa merujuk pada upaya memperkuat institusi dan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Pearson *et al.*, 2018).

## **2. Kapasitas**

Kapasitas adalah kemampuan atau daya tampung suatu entitas, baik itu individu, organisasi, sistem, atau infrastruktur, untuk melaksanakan fungsi atau tugas tertentu secara efektif. Dalam konteks individu, kapasitas mencakup keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi yang dimiliki untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan. Pada tingkat organisasi, kapasitas merujuk pada sumber daya manusia, finansial, dan teknis yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, dalam konteks sistem atau infrastruktur, kapasitas mencerminkan kemampuan untuk menampung dan mengelola beban atau volume tertentu tanpa mengalami kerusakan atau penurunan kinerja. Meningkatkan kapasitas sering kali melibatkan pelatihan, pengembangan keterampilan, peningkatan infrastruktur, serta perbaikan proses dan manajemen sumber daya (Suhadi, 2016).

## **3. BPP (Balai Penyuluhan Pertanian)**

Tempat pertemuan dan koordinasi antara Penyuluhan, pelaku utama, dan pelaku usaha yang berfungsi untuk menyelenggarakan Penyuluhan pertanian di Kecamatan. Balai Penyuluhan Pertanian adalah untuk memberdayakan petani dan penduduk sektor pertanian melalui kegiatan pendidikan pertanian informal untuk membantu diri mereka sendiri baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan (Sadono, 2010).

## F. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan konsep teori *Good Governance* karena relevan dengan penelitian ini. Konsep – konsep dalam *Good Governance*, seperti akuntabilitas, partisipasi, transparansi, tegaknya hukum, efisiensi dan efektifitas dapat memberikan kerangka kerja yang baik untuk menganalisis bagaimana penguatan kapasitas petani melalui Penyuluhan pada (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dalam konteks ini, *Good Governance* menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, yang selaras dengan aspek tata kelola pemerintahan pada sektor pertanian.

### a. Pengertian *Good Governance*

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Definisi tata kelola pemerintahan atau lebih di kenal dengan dengan *good governance*, secara pengertiannya adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Kamaluddin, 2019). *Good governance* adalah upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan yang sejalan dengan aturan yang berlaku, melakukan pencegahan korupsi, dan menjalankan disiplin anggaran bagi terciptanya aktivitas usaha (Oktarina *et al.*, 2016).

*Good Corporate Governance* merupakan serangkaian hukum dan peraturan yang mencakup kaidah yang harus dipenuhi untuk mendorong kinerja organisasi sehingga lebih efisien untuk menghasilkan nilai ekonomi dalam waktu yang panjang (Maulamin *et al.*, 2018). *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. *Good governance* juga bisa dijadikan sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh

pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara (Supratman, 2018).

*Good Governance* merupakan pemerintahan yang baik, atau suatu pelaksanaan manajemen pembangunan yang mutlak serta bertanggungjawab yang berasaskan prinsip demokrasi (Indriana & Nasrun, 2019). Bisa disimpulkan bahwa *Good Governance* mencerminkan usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sejalan dengan kebijakan yang berlaku, dengan tujuan mencapai pemerintahan yang efektif dan bersih.

*Good Governance* bertujuan untuk melaksanakan nilai-nilai manajemen sektor swasta pada sektor publik agar tercapainya organisasi sektor publik yang tercapai. Upaya berhasilnya suatu pemerintah dilandasi dengan tata kehidupan yang dilandasi dengan prinsip yang sesuai dengan *good governance*. Pengaruh *good governance* merupakan teknik menyusun dan menerapkan aturan, determinasi, serta prioritas pembangunan melalui partisipasi dari masyarakat (Indriana & Nasrun, 2019).

b. Konsep *Good Governance*

*Good Governance* adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Konsep *good governance* sendiri dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dibicarakan dalam berbagai konteks dan menjadi isu yang mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini terjadi karena bagian dari luapan pola – pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah atau dengan kata lain semakin tidak efektifnya pemerintahan disamping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Beberapa pakar dan teoritis administrasi berpendapat bahwa peranan pemerintah harus memfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk

melalui diskusi yang berlangsung dalam ruang publik (Surahman & Nazaruddin, 2021).

Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya disini. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik interen birokrasi, masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran hanya akan terwujud apabila pemerintahan didekatkan dengan yang diperintah atau dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak tanggungjawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatutan dalam pemerintahan (*good governance*). Melalui paradigma *good governance* sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi masing-masing *stakeholders* dapat diaktualisasikan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 26 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian merupakan amanat dari UU Ciptaker, namun dalam konsideran menimbang tidak menjelaskan secara rigid amanat pasal dari UU Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian. Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Pertanian tidak akan maju jika terus menggunakan cara lama atau teknologi lama jadi pertanian membutuhkan inovasi dan teknologi baru untuk dapat meningkatkan perkembangan zaman dengan hal ini membuat teknologi pertanian akan semakin berkembang (Bonai & Lambelanova, 2023).

Seiring dengan adanya keinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik/*good governance* tersebut, maka sistem penyelenggaraan

pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Paling tidak syarat agar terciptanya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dewasa ini. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik pada umumnya dalam upaya mewujudkan paradigma *good governance* yang merupakan sebagai bingkai kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tentu bukanlah hal yang mudah dalam mencapai hal tersebut. Akan tetapi dibutuhkan suatu tekad yang kuat dari berbagai stakeholders untuk mewujudkannya (Zulkarnain & Mitrayanti, 2020).

#### c. Prinsip – Prinsip *Good Governance*

Pokok utama dalam memahami *good governance* adalah mampu memahami prinsip yang terdapat didalamnya. Baik buruknya tata kelola pemerintah dapat dilihat dari semua prinsip-prinsip yang terlaksana dalam suatu pemerintahan (Rosyada, 2016). Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2012) yang dikutip dalam (Kamaluddin, 2019) bahwa prinsip-prinsip *Good Governance* terdiri dari:

##### 1. Akuntabilitas

Aparatur pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugas dan fungsinya. Aparatur pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan, program dan kegiatannya yang dilaksanakan atau dikeluarkannya termasuk pula yang terkait erat dengan pendayagunaan ketiga komponen dalam birokrasi pemerintahan, yaitu kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusianya.

Prinsip akuntabilitas mensyaratkan adanya perhitungan *cost and benefit analysis* (tidak terbatas dari segi ekonomi, tetapi juga sosial, dan sebagainya tergantung bidang kebijaksanaan atau kegiatannya) dalam berbagai kebijaksanaan dan tindakan aparatur pemerintah. Selain itu, akuntabilitas juga berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Dengan demikian, tidak ada satu kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan yang dapat lepas dari prinsip ini.

## 2. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penyampaian pendapat secara langsung dalam forum-forum diskusi atau pertemuan umum, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan feedback yang konstruktif. Selain itu, masyarakat juga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka, baik melalui keikutsertaan dalam rapat-rapat pengambilan keputusan ataupun dengan menggunakan saluran-saluran komunikasi yang disediakan.

Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan perwakilan dari instansi atau organisasi yang mereka percayai untuk menyuarakan kepentingan mereka secara efektif. Dengan melibatkan perwakilan ini, masyarakat dapat memastikan bahwa suara mereka tidak hanya terdengar tetapi juga diakomodasi dalam setiap kebijakan atau

program yang diimplementasikan. Melalui pendekatan ini, diharapkan proses pembuatan keputusan menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dari setiap kebijakan atau program yang diterapkan.

### 3. Ketaatan Pada Aturan Hukum

Aparatur pemerintah menjunjung tinggi dan mendasarkan setiap tindakannya pada aturan hukum, baik yang berkaitan dengan lingkungan eksternal (masyarakat luas) maupun yang berlaku terbatas di lingkungan internalnya, misalnya aturan kepegawaian dan aturan pengawasan fungsional. Prinsip ini juga mensyaratkan terbukanya kesempatan kepada masyarakat luas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam perumusan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masyarakat.

Prinsip komitmen yang kuat untuk bekerja bagi kepentingan bangsa dan negara, dan bukan pada kelompok, pribadi atau partai yang menjadi idolanya Prinsip ini merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh aparatur pemerintahan. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi pemerintah, sebagai pembina, pengarah, dan penyelenggara pemerintahan umum dan pembangunan (dalam batas – batas tertentu). Prinsip komitmen untuk mengikutsertakan dan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Prinsip ini menegaskan bahwa tanpa komitmen ini, maka yang timbul bukan partisipasi masyarakat tetapi antipati dan ketidaksukaan dalam diri masyarakat terhadap perilaku dan kebijaksanaan aparatur pemerintah. Pada saat yang sama, dalam diri aparatur pemerintah akan tumbuh

secara perlahan tetapi pasti sikap mendominasi, anggapan atau perasaan paling tahu, paling bisa dan paling berkuasa, dan cenderung tidak mau tahu kondisi dan pendapat orang lain, yang pada akhirnya menimbulkan arogansi birokrasi pemerintah.

#### 4. Transparansi

Dalam *good governance* mensyaratkan empat azas, yaitu: transparansi (*transparency*), pertanggungjawaban (*accountability*), kewajaran atau kesetaraan (*fairness*), dan kesinambungan (*sustainability*), dengan pengertian sebagai berikut:

- a) Transparansi, bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi seperti itu, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat saja secara tidak proporsional.
- b) Akuntabilitas, bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi penumpukkan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi (*checks and balances system*).
- c) Kewajaran atau kesetaraan, bermakna memberikan kesempatan yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk ambil bagian dalam pengambilan pengambilan keputusan publik.

#### 5. Efisiensi dan efektifitas

Prinsip dasar yang harus diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan secara menyeluruh. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pelayanan tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Implementasi prinsip ini melibatkan identifikasi kebutuhan aktual masyarakat, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas layanan yang diberikan, serta perbaikan berkelanjutan dalam proses dan prosedur yang ada. Dengan pendekatan yang terstruktur dan berbasis pada data, setiap lembaga publik dapat lebih efektif dalam menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dan ekspektasi publik, sehingga hasil akhir dari pelayanan publik menjadi lebih relevan dan memuaskan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang bersangkutan tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelayanan.

#### G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah sebuah pengertian yang diberikan kepada variabel dengan maksud untuk memberikan arti atau menggambarkan langkah-langkah operasional yang harus dijalankan untuk mengukur variabel yang spesifik. Variabel – variabel berbeda yang secara teknis dapat didefinisikan bahwa penelitian ini untuk prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah:

##### 1) Akuntabilitas

Aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan dalam tugas dan fungsi. Harus bertanggung jawab atas kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan organisasi, tata kelola, dan sumber daya manusia dalam birokrasi pemerintahan. Prinsip akuntabilitas menuntut adanya analisis *cost and*

*benefit* yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lainnya sesuai dengan bidang kebijaksanaan atau kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Selain itu, akuntabilitas juga terkait dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam mencapai sasaran atau target dari kebijaksanaan atau program yang dijalankan. Dengan demikian, prinsip ini menjadi landasan yang tidak dapat diabaikan dalam setiap kebijaksanaan, program, dan kegiatan pemerintah.

## 2) **Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)**

Keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk penyampaian pendapat dan pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui instansi yang mewakili kepentingan mereka. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan dan feedback pada forum-forum diskusi atau pertemuan umum, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Selain itu, mereka juga dapat memanfaatkan perwakilan dari instansi atau organisasi yang mereka percayai untuk menyuarakan kepentingan dan kebutuhan mereka secara efektif, sehingga memastikan bahwa suara mereka terdengar dan diakomodasi dalam setiap kebijakan atau program yang diimplementasikan.

## 3) **Ketaatan Pada Aturan Hukum**

Aparatur pemerintah harus tunduk pada aturan hukum, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Prinsip ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam perumusan peraturan yang memengaruhi mereka. Komitmen yang kuat untuk bekerja demi kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kelompok, pribadi, atau partai, adalah esensi bagi aparatur pemerintahan. Prinsip ini menegaskan pentingnya memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, karena tanpanya dapat muncul ketidakpuasan terhadap

pemerintah. Ketidakberlanjutan komitmen ini dapat mengakibatkan sikap dominan dan arogansi dalam birokrasi pemerintah.

#### **4) Transparansi**

Transparansi mengidentifikasi empat azas good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, kewajaran atau kesetaraan, dan kesinambungan. Transparansi mencakup ketersediaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik, memungkinkan partisipasi dan pengawasan masyarakat serta mencegah kecurangan. Akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban melalui distribusi kekuasaan dan mekanisme saling mengawasi. Kewajaran atau kesetaraan berarti memberikan peluang yang sama bagi semua kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

#### **5) Efisiensi dan efektifitas**

Efisiensi dan efektivitas adalah dua konsep penting yang saling terkait namun memiliki fokus yang berbeda. Efisiensi merujuk pada penggunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya secara optimal untuk mencapai hasil dengan usaha minimal. Ini berarti mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Di sisi lain, efektivitas berhubungan dengan sejauh mana tujuan atau sasaran yang diinginkan dapat tercapai. Jadi, sebuah proses bisa sangat efisien tetapi tidak efektif jika hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kinerja yang optimal, sebuah organisasi harus memastikan bahwa prosesnya efisien dalam penggunaan sumber daya dan efektif dalam pencapaian hasil yang diinginkan. Dengan demikian, pengukuran dan evaluasi terhadap kedua aspek ini penting untuk perbaikan berkelanjutan dan pencapaian tujuan strategis.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo. Kualitatif berarti mengumpulkan data berupa kata-kata atau gambar. Data ini dari naskah wawancara, catatan lapangan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang mampu menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku dari orang-orang yang diamati.

### 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini terkait dengan Penguatan Kapasitas Petani Melalui Penyuluhan Studi Pada (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Lokasi penelitian ada di Kecamatan Sukorejo. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena ingin mengetahui penguatan kapasitas petani melalui Penyuluhan studi pada (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

### 3. Subjek/Teknik Pemilihan Informan

Subjek dalam penelitian ini adalah (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP yang menjadi alasan peneliti memilih informan ini karena peneliti berasumsi bahwa informan dapat memberikan hasil kerjasama yang nantinya akan peneliti selidiki. Pemilihan informan ini didasarkan pada dua aspek yaitu teori dan spekulasi yang keduanya didasarkan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman informan. Patton (2002) menyebutkan dengan teknik *purposive sampling* menjadi pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif sepenuhnya juga ditentukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran dalam investigasi ini adalah (Balai Penyuluhan Pertanian) BPP.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder untuk mengumpulkan data primer. Peneliti menggunakan teknik berikut :

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dan informasi sebanyak-banyaknya serta untuk mendefinisikan subjek penelitian harus sejelas mungkin (Gunawan,2015). Wawancara adalah pengumpulan informasi dengan cara bertanya dan informan menjawab pertanyaan antara pewawancara atau interviewer dengan orang yang diwawancarai. Wawancara sebagai sarana pemeriksaan, bukti informasi atau data yang diperoleh sebelumnya. Wawancara ini menggunakan penelitian metode kualitatif untuk melakukan wawancara dengan proses tanya jawab yang dilakukan secara tatap mata dengan informan. Dalam wawancara ini, metode pengumpulan data melibatkan proses tanya jawab langsung dengan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendukung penelitian yang dilakukan di kantor BPP Kecamatan Sukorejo serta GAPOKTAN yang ada di Sukorejo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah suatu bentuk wawancara dalam penelitian kualitatif yang berisi serangkaian pertanyaan pendahuluan sehingga memungkinkan pewawancara untuk mengeksplorisasikan perkembangan baru dalam alasan wawancara (Achmad & Ida, 2018).

## **b. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan informasi dengan mencatat informasi yang ada atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki. Dokumentasi juga diartikan sebagai masalah masa lalu, dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental. Metode ini mengumpulkan informasi dengan cara yang sudah tersedia dalam catatan dokumenter. Dalam penelitian sosial, fungsi informasi data yang diperoleh dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai bahan pembantu dan melengkapi informasi dasar yang diperoleh dari observasi mendalam dan wawancara (Thalib, 2022).

## **c. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan upaya untuk meningkatkan rasa kepercayaan pada data yang dapat atau tidaknya data tersebut dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Untuk meningkatkan derajat validitas data agar dapat diuji secara optimal, maka perlu dilakukan uji keabsahan data (Mekarisce, 2020).

Pada penelitian ini peneliti menguji keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah validasi data dengan menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan verifikasi atau untuk perbandingan dengan data tersebut. Triangulasi juga dapat disebut sebagai teknik pengujian yang menggunakan penggunaan sumber, yaitu perbandingan dan verifikasi terhadap data yang diperoleh. Norman K Denzin (1978) mengemukakan bahwa triangulasi meliputi empat hal, yaitu: triangulasi metode, triangulasi antar penelitian (bila penelitian dilakukan secara berkelompok), triangulasi sumber data, serta triangulasi teori.

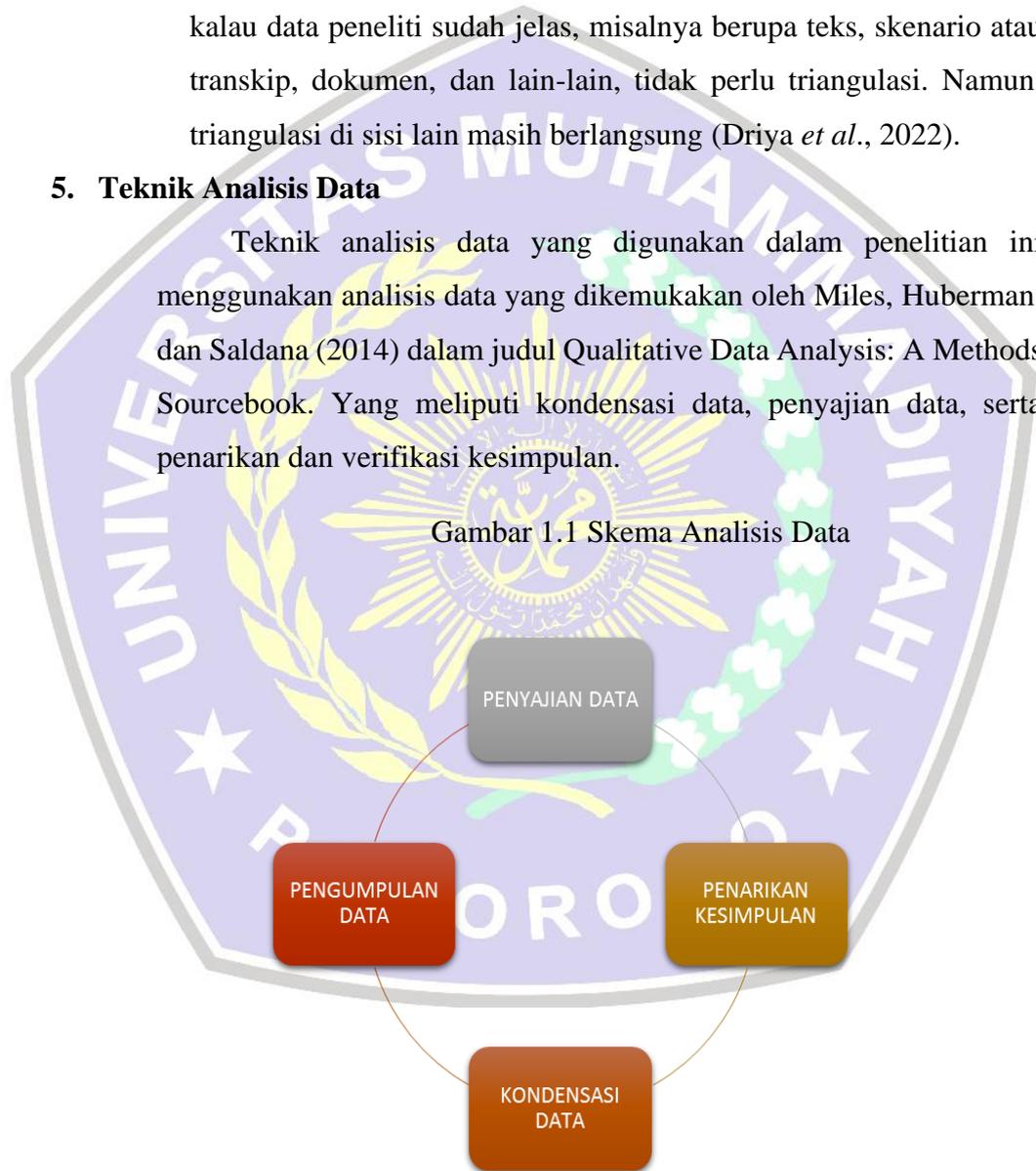
Di dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan triangulasi metode. Cara yang dilakukan dari triangulasi metode adalah membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memperoleh

gambaran yang dapat di percaya tentang kredibilitas informasi dan gambaran dari informasi tertentu, peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau observasi dan dokumentasi untuk memverifikasi kredibilitas. Selain itu, peneliti juga menggunakan berbagi informan untuk mengecek keaslian informasi tersebut. Oleh karena itu, jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan, maka dilakukan triangulasi pada tahap ini. Jadi kalau data peneliti sudah jelas, misalnya berupa teks, skenario atau transkrip, dokumen, dan lain-lain, tidak perlu triangulasi. Namun, triangulasi di sisi lain masih berlangsung (Driya *et al.*, 2022).

### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam judul *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

Gambar 1.1 Skema Analisis Data



*Sumber: (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014)*

Model analisis seperti diatas peneliti memiliki tiga kegiatan pengumpulan data. Dengan adanya empat poin peneliti harus aktif

selama pengumpulan data, selanjutnya bolak-balik dalam proses kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi) selama penelitian. Proses analisis penelitian ini dilakukan terus berulang dan terus berlanjut selama pengambilan data berlanjut sampai penelitian siap dikerjakan baru proses tersebut berakhir. Berikut adalah penjabaran dari proses pengumpulan data :

**a) Kondensasi data**

Kondensasi data adalah pengumpulan data berupa dokumen, foto dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menggunakan alat bantu alat perekam dan alat pencatat. Data kualitatif dapat dimodifikasi dengan pemilihan, ringkasan, atau penjelasan dalam bahasa sendiri. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung terhadap kantor BPP Kecamatan Sukorejo serta GAPOKTAN yang ada di Sukorejo.

**b) Penyajian Data**

Penyajian Data adalah kumpulan informasi yang disusun yang memberikan kemungkinan menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Tahap ini juga dilakukan display data secara sistematis agar lebih mudah dipahami dan diteliti sehingga yakin saat dipaparkan. Data tersebut dapat disajikan melalui grafik, deskripsi, bagan, dan lain-lain. Setelah mengumpulkan data tentang Penguatan Kapasitas Petani Melalui Penyuluhan Studi Pada BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Sukorejo.

**c) Penarikan Kesimpulan**

Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Kesimpulan merupakan arti dari data yang telah diteliti dan juga di verifikasi secara langsung selama penelitian. Cara yang dapat digunakan untuk penarikan kesimpulan berupa melakukan

pencatatan untuk pola tema yang sama, mengelompokan dan mencari penyimpangan atau perbedan dari yang lainnya. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru yang berbeda dengan sebelumnya. Kesimpulan merupakan bukti penelitian yang dilakukan, dan setelah memaparkan data tentang Penguatan Kapasitas Petani Melalui Penyuluhan Studi Pada BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, siapa saja *stakeholder* atau kelompok yang terlibat dalam kerjasama Penyuluhan pertanian GAPOKTAN (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014).

